

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan dan kawasan yang kuat merupakan kepentingan utama Amerika Serikat.¹ Namun, proses realisasi kepentingan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi AS karena adanya benturan visi misi politik serta kepentingan lain yang dimiliki Venezuela. Sejak masa kepemimpinan mantan presiden Hugo Chavez, Venezuela telah bergerak dalam sistem pemerintahan otoritarianisme. Hubungan antara AS dan Venezuela sejak kepresidenan Hugo Chaves, AS dan Venezuela telah menjadi ancaman keamanan tingkat menengah satu sama lain.² Isu – isu hak asasi manusia, keamanan, ekonomi hingga militer merupakan bidang – bidang yang selalu menjadi bahan perdebatan antara AS dan Venezuela. Hal tersebut tentu membuat AS memberikan prioritas kebijakan luar negerinya terhadap Venezuela untuk melindungi ancaman – ancaman keamanan kawasan.

Kompleksitas hubungan luar negeri AS dan Venezuela dapat ditinjau melalui bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi, AS dan Venezuela secara tidak langsung memiliki hubungan kerja sama yang cukup baik. Sebagai negara penghasil minyak bumi terbesar di kawasan Amerika bahkan di dunia, AS dan Venezuela menjalin kerja sama perdagangan berbasis minyak bumi yang telah

¹Rendon Moises, 2017, *Why Venezuela Should Be a U.S. Foreign Policy Priority*, Center of Strategic & International Studies: <https://www.csis.org/analysis/why-venezuela-should-be-us-foreign-policy-priority>, diakses pada 30 Maret 2024.

² Javier Corrales & Carlos A. Romero, 2012, U.S.—Venezuelan Relations after Hugo Chavez; Why Normalization Has Been Impossible, dalam *Contemporary U.S.—Latin American Relations; Cooperation or Conflict in the 21st Century?*, Routledge, London.

berlangsung jauh sebelum Hugo Chavez menjabat.³ Meskipun perdagangan dalam sektor minyak tersebut hingga saat ini mengalami penurunan yang sebagian besar diakibatkan karena produksi minyak Venezuela yang menurun dan krisis ekonomi Venezuela itu sendiri, hingga saat ini AS memiliki kepentingan ekonomi terhadap Venezuela melalui pasokan minyak bumi yang dapat menguntungkan kedua negara.

Sedangkan dalam bidang politik, sejak kepresidenan Chavez, aspek – aspek mengenai pemisahan kekuasaan dan kebebasan berekspresi sangat dibatasi dan jauh dari penerapan nilai – nilai hak asasi manusia sebagaimana semestinya.⁴ Ketegangan situasi politik tersebut semakin meningkat di bawah pemerintahan Maduro, yang dituduh memanipulasi institusi demokrasi, menindas oposisi, media, dan masyarakat sipil, serta terlibat dalam perdagangan narkoba dan korupsi, dan menolak sebagian besar bantuan kemanusiaan dari AS maupun negara lain.⁵ Tindakan – tindakan politik pemerintah Venezuela yang bertentangan dengan AS diantaranya adalah kerja sama dalam perdagangan senjata, nuklir, peredaran narkoba dengan negara – negara yang tidak sejalan dengan kepentingan AS. Pada tahun 2005, Hugo Chavez mengakhiri kerja sama Venezuela dengan AS dalam memerangi narkoba dan mendeportasi beberapa

³ Javier Corrales & Carlos A. Romero, 2012, U.S.—Venezuelan Relations after Hugo Chavez; Why Normalization Has Been Impossible, dalam Contemporary U.S.—Latin American Relations; Cooperation or Conflict in the 21st Century?, Routledge, London.

⁴ *Ibid.*

⁵ Clare Ribando; Rebecca M. Nelson; Phillip Brown & Rhoda Margesson, 2020, Venezuela: Background and U.S. Relations, https://www.everycrsreport.com/files/2020-08-26_R44841_25b4ecbe0a39b4d82bf19aa7ca052d19dd965db7.pdf, diakses pada 22 Mei 2025.

pejabat Amerika.⁶ Lalu pada tahun 2010, Chavez menandatangani perjanjian dengan Rusia untuk mengembangkan reaktor nuklir.⁷ Tidak hanya itu, krisis hak asasi manusia yang membuat banyak masyarakat Venezuela meninggalkan negaranya untuk menghindari penindasan politik dan krisis ekonomi akibat inflasi dan kekurangannya kebutuhan pokok.⁸

Venezuela merupakan negara dengan sejumlah organisasi, serikat pekerja, kelompok kepentingan, perusahaan hingga lembaga – lembaga kenegaraan seperti lembaga peradilan, dewan pemilihan umum, mahkamah agung dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah.⁹ Melalui hal tersebut, peran presiden menjadi sangat dominan sehingga pemberlakuan kebijakan maupun tindakan politik sebagian besar dijalankan dengan minimnya keterlibatan suara masyarakat. Venezuela merupakan salah satu negara dengan riwayat pemilihan presiden yang kontroversial dan memicu ketegangan situasi politik dalam pemerintah maupun masyarakat bahkan antar negara-negara lain akibat proses maupun hasil dari pemilihan umum itu sendiri. Mengacu pada krisis kepresidenan atau ketegangan politik Venezuela akibat terpilihnya kembali Nicolás Maduro sebagai presiden merupakan salah satu kasus pemilihan umum yang akhirnya memicu perhatian beberapa negara lain untuk turut serta menyikapi maupun menindaklanjuti konflik yang terjadi akibat pemilihan presiden Venezuela yang terjadi pada 2018.

⁶Erik Bakke, 2014, *US-Venezuelan Relations*, <https://www.addisonlibrary.org/sites/default/files/House-Foreign-Affairs-US-Venezuela.pdf>, diakses pada 30 Maret 2024.

⁷Rendon Moises, 2017, *Why Venezuela Should Be a U.S. Foreign Policy Priority*, Center of Strategic & International Studies: <https://www.csis.org/analysis/why-venezuela-should-be-us-foreign-policy-priority>, diakses pada 30 Maret 2024.

⁸Vanessa Buschschlüter, 2024, *Venezuela Crisis In Brief*, BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-48121148>, diakses pada 30 Maret 2024.

⁹ *Ibid.*

Banyaknya kandidat yang dilarang untuk mencalonkan diri pada pemilihan umum Mei 2018 merupakan salah satu dari banyaknya kontroversi yang menolak kemenangan Maduro.¹⁰ Kekacauan politik pasca pemilihan presiden yang juga terjadi pada tahun 2013 akibat banyaknya protes massal dari masyarakat yang merasa bahwa terpilihnya Maduro sebagai presiden untuk menjalani sisa masa jabatan Hugo Chavez; presiden Venezuela sebelum Maduro yang meninggal dunia, melalui penanganan dengan tindak kekerasan memperkuat tidak hanya masyarakat namun juga negara lain berada pada pihak oposisi untuk melawan kepemimpinan Maduro. Banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, krisis ekonomi, meningkatnya tingkat kemiskinan, degradasi tingkat kesehatan masyarakat yang memprihatinkan akibat akses terhadap obat-obatan, fasilitas kesehatan maupun ketersediaan makanan yang terbatas membuat masyarakat terpaksa untuk bermigrasi ke negara lain untuk mendapatkan kelayakan hidup yang lebih baik merupakan beberapa dari serangkaian faktor atas banyaknya oposisi terhadap pemerintahan Maduro.¹¹ Kondisi pemerintahan dibawah Maduro tersebut secara tidak langsung merupakan keberlanjutan atas pemerintahan sebelumnya, Hugo Chavez. Rezim Chavez yang cenderung otoriter merupakan sebuah 'tradisi' yang diteruskan dan saat ini dijalankan oleh Maduro.

Ancaman, hukuman penjara, denda dan segala bentuk sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melawan pemerintah secara langsung maupun tidak langsung merupakan mekanisme kepemimpinan yang telah dijalankan

¹⁰ bbc.com, 2021, *Venezuela crisis: How the political situation escalated*, BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-36319877>, diakses pada 30 Maret 2024.

¹¹Vanessa Buschschlüter, 2024, *Venezuela Crisis In Brief*, BBC News <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-48121148>, diakses pada 30 Maret 2024.

Chavez dan Maduro. Maduro berhasil menjadi wakil presiden Venezuela selama 2012-2013. Setelah kematian Chavez pada Maret 2013, posisi Maduro sebagai wakil presiden berubah dalam sekejap menjadi presiden melalui kemenangannya pada pemilihan khusus pada April 2013, mengalahkan Henrique Capriles. Kemenangan tersebut merupakan kemenangan kontroversial pertama Maduro akibat banyaknya tuduhan atas hasil suara yang tidak sah, termasuk tuduhan dari Capriles yang menuntut untuk diadakannya pemilihan ulang.¹²

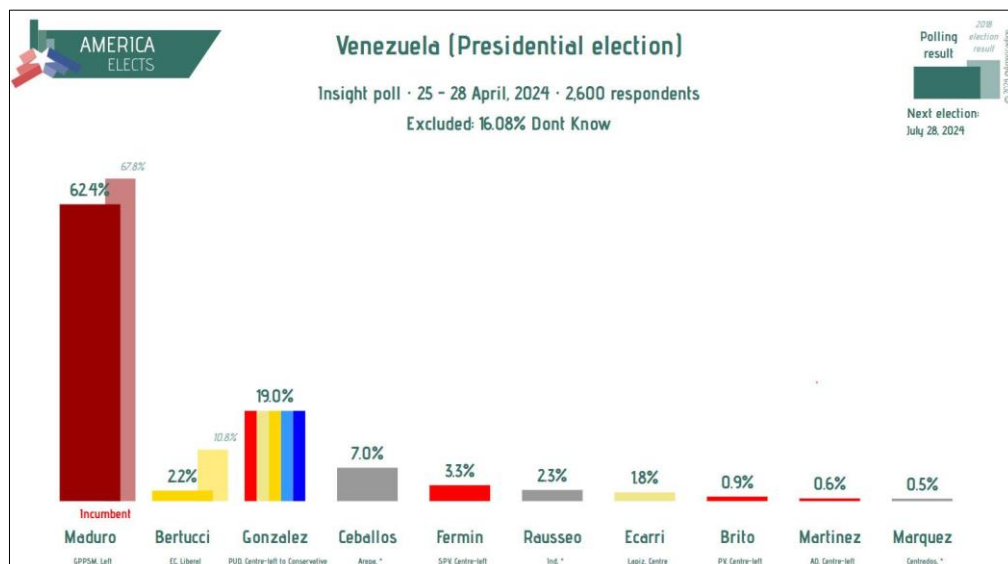
Kembali memenangkan hasil suara terbanyak pada pemilihan umum presiden tahun 2018 membuat masyarakat serta berbagai pihak oposisi baik di dalam maupun luar pemerintahan kembali menanyakan keabsahan hasil suara tersebut setelah kemenangan pertamanya pada tahun 2013. Kemenangan Maduro kali ini tidak hanya menuai protes namun juga kecaman serta penolakan pengakuan dari masyarakat dan pemerintah yang berada pada pihak oposisi. Terpilihnya kembali Maduro tidak diakui oleh Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi, yang menyebut Maduro sebagai perampas dan berpendapat bahwa kursi kepresidenan masih kosong.¹³ Keotoriteran Maduro serta krisis *multilayer* yang telah Venezuela alami, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan sebagainya sejak tahun 2013 hingga saat ini memberikan celah yang besar bagi pihak-pihak oposisi untuk menentang kepemimpinannya.

Pemilihan umum pada tahun 2018, Maduro memenangkan suara sebanyak 67,7%, mengalahkan Henri Falcón; mantan gubernur negara bagian Lara, yang

¹² Jeff Wallenfeldt, 2021, *Nicolás Maduro*, <https://www.britannica.com/biography/Nicolas-Maduro>, diakses pada 27 November, 2021.

¹³ bbc.com, 2021, *Venezuela crisis in 300 words*, BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-48121148>, diakses pada November, 2021.

memperoleh 21% suara dan Javier Bertucci; seorang pendeta evangelis yang memperoleh hanya 10,8% suara¹⁴. Perkiraan jumlah pemilih yang dilansir oleh Dewan Pemilihan Venezuela hanya 46,1% yang mengalami penurunan drastis sebanyak 80% dari catatan pemilihan umum presiden terakhir pada tahun 2013 akibat boikot yang dilakukan oleh oposisi utama Venezuela.¹⁵



Gambar 1. 1 Gambar Hasil Pemilu Venezuela Tahun 2018 (Sumber : America Elects, 2024, *Venezuela : Insight Poll*, Twitter Official Account America Elects : <https://x.com/AmericaElige/status/1787569175575359992>.)

Terpilihnya kembali Maduro menjadi Presiden Venezuela pada tahun 2018 dan pelantikannya pada tahun 2019 dinilai bukan hasil pemilihan yang sah akibat adanya kecurangan berupa ‘pembelian suara’ kepada masyarakat dengan pemindaian ‘kartu tanah air’ setelah memberikan suara dengan tujuan untuk menerima hadiah yang dijanjikan oleh Maduro hingga penempatan titik-titik pro

¹⁴ Clare Ribando Seelke, 2018, Venezuela’s 2018 Election: Congressional Research Service (2018, 24 Mei). <https://sgp.fas.org/crs/row/IN10902.pdf>. Diakses pada 15 Mei 2025.

¹⁵ Tom Phillips, 2018, Venezuela elections : Maduro wins second term, The Guardian : <https://www.theguardian.com/world/2018/may/21/venezuela-elections-nicolas-maduro-wins-second-term>, diakses pada 14 Mei 2025.

pemerintah di dekat tempat pemungutan suara.¹⁶ Selain itu, pasal 230 dan 231 konstitusi Venezuela menyatakan bahwa masa jabatan presiden dimulai pada 10 Januari, sedangkan Maduro mengklaim bahwa dirinya adalah presiden resmi terpilih setelah Dewan Pemilihan Nasional meresmikannya sebagai presiden setelah 20 Mei 2018.¹⁷

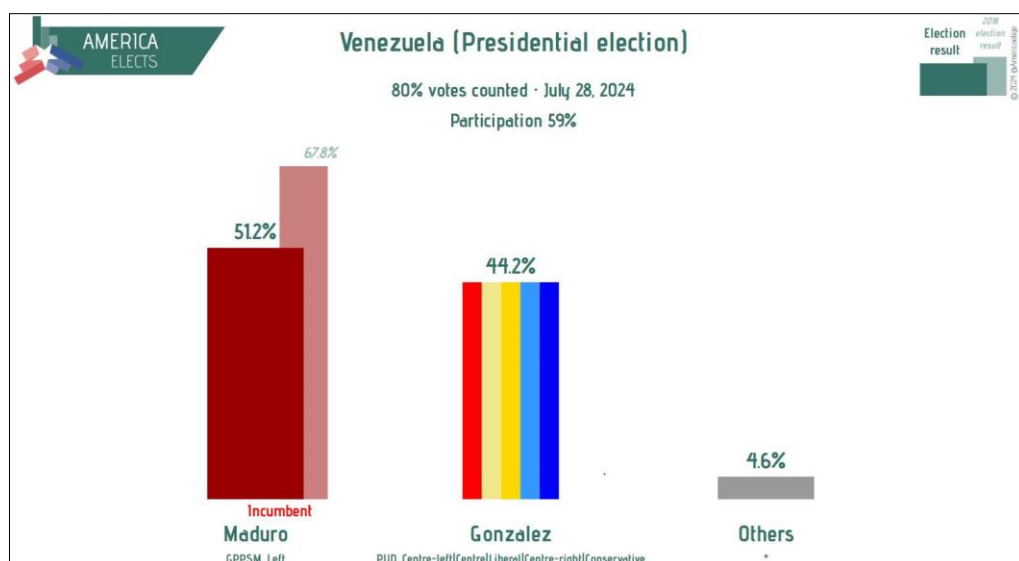
Hal tersebut tentu merupakan alasan mendasar dan utama selanjutnya; setelah hasil pemungutan suara yang tidak sah, atas mengapa Majelis Nasional tidak mengakui status resmi periode kedua Maduro sebagai presiden. Pemilihan umum melanggar transparansi di semua siklus pemilu dan diselenggarakan oleh majelis konstituante nasional tidak sah yang tidak memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan menurut konstitusi.¹⁸ Dengan adanya kasus tersebut, pelantikannya pada tanggal 15 Januari 2020 dinyatakan tidak sah oleh Majelis Nasional, dilanjutkan dengan pernyataan-pernyataan 13 negara Amerika Latin, anggota *Lima Group* hingga perwakilan Uni Eropa yang tidak akan mengakui legitimasi masa jabatan baru Maduro. Berdasarkan lebih dari 50 negara yang menolak Maduro sebagai presiden sah Venezuela, Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang mengecam keras akan hasil pemilihan umum presiden tersebut.

¹⁶ Scott Neuman, 2018, *Venezuela's Maduro Wins Boycotted Elections Amid Charges Of Fraud*, NPR: <https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2018/05/21/612918548/venezuelas-maduro-wins-boycotted-elections-amid-charges-of-fraud>, diakses pada 25 September, 2021.

¹⁷ José Ignacio Hernández, 2019, *Venezuela's Presidential Crisis and the Transition to Democracy*, Center For Strategic and International Studies: https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/190125_Hernandez_Venezuela_pageproofs3.pdf, diakses pada 27 November, 2021.

¹⁸ *Ibid.*

Amerika Serikat dan Venezuela telah lama menjalani ketegangan bilateral sejak kepresidenan Hugo Chavez. Pada masa kepresidenannya sebelum digantikan oleh Maduro pada tahun 2013, Chavez telah mereformasi konstitusi radikal untuk mendominasi pemerintahan dan lembaga publik Venezuela, membentuk prioritas-prioritas politik luar negeri yang bersenjangan dengan Amerika Serikat, melakukan pemisahan kekuasaan, banyaknya konflik-konflik pelanggaran HAM termasuk kebebasan berekspresi. Dilanjutkan dengan kepemimpinan Maduro yang merupakan lanjutan dari rezim Chavez yang sangat menentang keberpengaruhan Amerika dalam kepentingan nasional Venezuela, membuat Amerika bersikap agresif terhadap pemerintahan Maduro. Sejak memasuki pemerintahan dan menjabat menjadi menteri luar negeri, Maduro telah berusaha untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh Amerika pada urusan nasional maupun luar negeri Venezuela. Dalam perkembangannya, Maduro kembali memenangkan pemilihan umum Presiden Venezuela pada tahun 2024.



Gambar 1. 2 Gambar Hasil Pemilihan Umum Presiden Venezuela tahun 2024 (Sumber : America Elects, 2024, Venezuela (Presidential Election), Official Twitter America Elects : <https://x.com/AmericaElige/status/1817778158076117440>).

Kemenangan Maduro tersebut kembali menuai kontroversi dan krisis kembali karena adanya kecurangan dan otoritarian yang sama seperti tahun 2018 lalu. Proses pemilu Venezuela tidak memenuhi standar integritas pemilu internasional disetiap tahapannya dan melanggar sejumlah ketentuan hukum nasionalnya sendiri.¹⁹ Kecurangan yang terjadi diantaranya adalah gangguan pendaftaran pemilih akibat tenggat waktu yang pendek, tempat pendaftaran yang relatif sedikit, penahanan para pejabat politik, informasi publik yang minim hingga kurangnya transparansi hasil pemilu dari Dewan Pemilihan Umum.²⁰ Hal tersebut tentu menuai protes dari masyarakat yang mengakibatkan terjadinya penangkapan pengunjung rasa sebanyak lebih dari 1.500 orang oleh Garda Nasional Venezuela dan korban jiwa yang setidaknya berjumlah 24 orang.²¹

Setelah Dewan Pemilihan Nasional (CNE) menyatakan Nicolás Maduro sebagai pemenang pada dini hari tanggal 29 Juli, ribuan warga melakukan aksi protes spontan yang memicu terjadinya 915 demonstrasi di berbagai wilayah negara.

Sebagai respons, pemerintah meluncurkan tindakan represif secara brutal terhadap para demonstran, yang menyebabkan sekitar 22 orang tewas. Sementara itu, Maduro memperingatkan bahwa jumlah korban bisa mencapai 2.000 orang

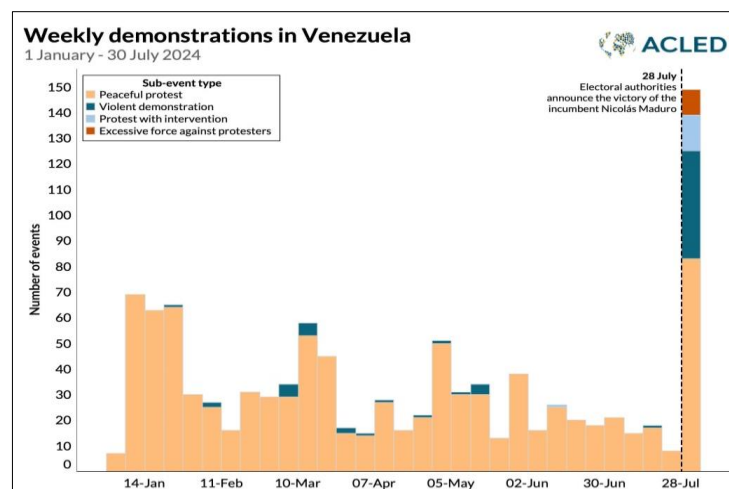
¹⁹ The Carter Center, 2024, *Carter Center Statement on Venezuela Election*, <https://www.cartercenter.org/news/pr/2024/venezuela-073024.html>, diakses pada 21 Maret 2025.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Chase Harrison; Gladys Gerbaud & Khalea Robertson, 2024, *Americas Society/Council of the Americas: How Have International Leaders Responded to Venezuela's 2024 Election?*, <https://www.as-coa.org/articles/how-have-international-leaders-responded-venezuelas-2024-election>, diakses pada 21 Maret 2025.

dan menegaskan bahwa “tidak akan ada pengampunan.” Kelompok oposisi dan organisasi masyarakat sipil turut menjadi sasaran intimidasi karena mengutuk kecurangan pemilu dan aksi kekerasan terhadap demonstran. Tindakan keras ini mencerminkan pola penganiayaan sistematis yang telah dilakukan oleh otoritas Venezuela sebelumnya. Dalam gelombang protes besar pada tahun 2017 dan 2019, aparat keamanan negara juga secara langsung menyerang warga sipil, mengakibatkan banyak korban jiwa, penahanan, dan luka-luka. Berdasarkan hal ini, pada Desember 2020, Kantor Kejaksaan Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC) menyatakan adanya alasan kuat untuk meyakini bahwa telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan—termasuk penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, kekerasan seksual seperti pemerkosaan, serta bentuk penganiayaan lainnya—yang dilakukan oleh pejabat sipil, militer, maupun individu yang bertindak atas nama pemerintah Venezuela.²²

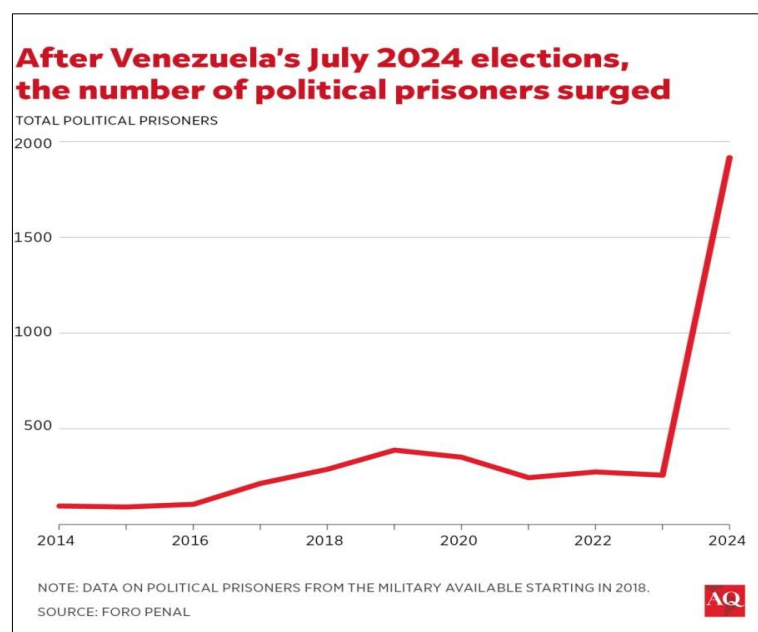
Pernyataan tersebut dapat didukung melalui grafik dibawah ini.



²² International Federation of Human Rights, 2024, *Venezuela: Reports of electoral fraud and escalating police violence*, FIDH : https://www.fidh.org/en/region/americas/venezuela/venezuela-reports-of-electoral-fraud-and-escalating-police-violence?utm_source=chatgpt.com).

Gambar 1. 3 Grafik Peningkatan Protes Masa Masyarakat Venezuela Kurun Waktu 1 Januari – 30 Juli 2024 (Sumber : Breda, 2024, *Violence mars one-third of Venezuela's post-election demonstrations*, ACLED Insight : <https://acleddata.com/2024/08/02/violence-mars-one-third-of-venezuelas-post-election-demonstrations-acled-insight/>).

Gambar diatas menjelaskan mengenai jumlah pengunjung rasa terhadap pemerintah Venezuela di tahun 2024 bulan Januari hingga Juli dimana pelaksanaan pemilu berlangsung mengalami peningkatan drastis. Para pengunjung rasa melakukan demo untuk menyerukan penegakan nilai demokrasi terutama waktu – waktu mendekati diselenggarakannya pemilu pada Juli 2024. Para demonstran kemudian dikendalikan oleh aparat nasional dengan kekerasan, bahkan dianggap teroris akibat protes yang dilakukan setelah diumumkannya hasil pemilu. Selain itu, penahanan para pejabat politik oposisi dengan pemerintahan Maduro juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebanyak hampir 2000 masyarakat telah ditahan karena adanya perbedaan pendapat politik yang memang ditujukan untuk menghilangkan pihak – pihak yang bertentangan dengan rezim Maduro. Hal tersebut dapat diperkuat dengan gambar berikut ini.



Gambar 1. 4 Jumlah Pejabat Politik dan Masyarakat Yang Ditahan Dalam Kurun Waktu 2014 – 2024 Terutama Sejak Pemilihan Umum 2024 Berlangsung (Sumber : Uzcátegu, 2024, *Venezuela's Record Political Prisoners Await the Unknown*, Americas Quarterly : <https://americasquarterly.org/article/venezuelas-record-political-prisoners-await-the-unknown/>).

Melalui gambar diatas, dijelaskan bahwa sejak tahun 2014, terkhusus tahun 2018 hingga 2024 tepatnya pada masa pemerintahan Maduro, keotoriteran pemerintah semakin terlihat melalui aksi penahanan yang dilakukan Maduro dalam menanggapi pihak oposisi. Dengan banyaknya pejabat maupun warga negara yang ditahan tersebut, *Inter-American Commission on Human Rights* menyebut penangkapan massal tersebut sebagai terorisme negara yang meningkatkan ketidakamanan politik dan sosial pada masyarakat. Hingga saat ini, Venezuela merupakan negara dengan jumlah tahanan politik tahanan politik terbesar di Belahan Barat, melampaui 1.113 tahanan politik Kuba dan 147 warga Nikaragua yang dipenjara karena ide dan keyakinan mereka.²³ Upaya-upaya yang dapat mengancam keamanan Amerika Serikat, pengabaian hukum internasional, termasuk kecurangan Maduro terhadap pemilihan umum membuat Amerika yang sangat menjunjung tinggi nilai demokrasi berupaya untuk menindak keras kepemimpinan Maduro yang diimplementasikan melalui manuver politik luar negerinya.

Melalui pemaparan tersebut, penulis melakukan peninjauan literatur dengan membedakan riset terdahulu terhadap pemaparan analisa serta

²³ Rafael Uzcátegu, 2024, *Venezuela's Record Political Prisoners Await the Unknown*, Americas Quarterly : <https://americasquarterly.org/article/venezuelas-record-political-prisoners-await-the-unknown/>.

penyesuaian konsep maupun teori yang penulis tuangkan dalam menjawab rumusan masalah. Adapun penulis membagi peninjauan menjadi tiga kategori, yaitu tulisan terkait latar belakang hubungan politik luar negeri antara Amerika Serikat dan Venezuela dan tulisan terkait penerapan kebijakan luar negeri berupa sanksi – sanksi internasional Amerika Serikat terhadap Venezuela.

Di kategori pertama terdapat penelitian mengenai “Hubungan Antara AS dan Venezuela” yang membahas mengenai sejarah situasi politik Venezuela dan dinamika hubungan politik luar negeri antara AS dan Venezuela. Tulisan ini menyoroti bagaimana Venezuela yang dipimpin dengan pemimpin sosialis cenderung ingin menghilangkan pengaruh AS pada negaranya, sedangkan AS sangat menjunjung tinggi nilai – nilai liberal dan kerjasama antar negara untuk mewujudkan agendanya pada negara-negara kawasan maupun dunia internasional. Perbedaan pandangan politik serta agenda AS yang menyangkut kepentingan kawasan akhirnya menimbulkan banyaknya kepentingan dua negara yang tidak dapat dijalankan dengan baik.²⁴

Pada kategori kedua terdapat penelitian “Mengapa Venezuela menjadi prioritas kebijakan luar negeri AS” yang membahas mengenai faktor – faktor penyebab AS menempatkan Venezuela sebagai prioritas kebijakan luar negeri AS. Penelitian ini menyebutkan terdapat lima alasan mengenai keterlibatan AS terhadap politik luar negeri Venezuela. Dimulai dari Venezuela sebagai salah satu negara kawasan dalam AS, kurangnya kebebasan berpendapat serta minimnya pemenuhan hak hak masyarakat yang akhirnya menimbulkan krisis kemanusiaan,

²⁴ Erik Bakke, 2014, *US-Venezuelan Relations*, <https://www.addisonlibrary.org/sites/default/files/House-Foreign-Affairs-US-Venezuela.pdf>, diakses pada 30 Maret 2024.

Venezuela yang menjadi ancaman keamanan nasional bagi AS, pengaruh regional yang dimiliki Venezuela serta peran Venezuela sebagai mitra dagang AS dalam ekspor minyak merupakan beberapa faktor yang menjadi acuan bagaimana AS memprioritaskan Venezuela kedalam agendanya.²⁵

Ketiga, terdapat penelitian mengenai “Motivasi AS Memberikan Sanksi Ekonomi Terhadap Venezuela”. Penelitian ini menyoroti latar belakang pemberian sanksi internasional terhadap Venezuela oleh AS serta bentuk – bentuk sanksi apa saja yang diberikan. Sejak krisis ekonomi yang dialami Venezuela sejak 2016, AS telah menyoroti Venezuela sebagai negara yang perlu mendapatkan penindakan kebijakan luar negeri yang khusus guna mengamankan kepentingan kawasan regional AS. Selain itu, dijelaskan bahwa sanksi internasional merupakan metode yang umum digunakan oleh AS dalam menindak lanjuti konflik internasional. Sanksi yang diberikan secara umum merupakan sanksi politik dan sanksi ekonomi. Dalam kasus ini, AS menggunakan kedua sanksi tersebut sebagai upaya kebijakan luar negeri yang diharapkan dapat menertibkan kondisi politik Venezuela dan hubungan politik luar negeri antara Venezuela dengan AS.²⁶

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan penulis adalah **“Bagaimana implementasi sanksi internasional**

²⁵ Rendon Moises, 2017, *Why Venezuela Should Be a U.S. Foreign Policy Priority*, Center of Strategic & International Studies: <https://www.csis.org/analysis/why-venezuela-should-be-us-foreign-policy-priority>, diakses pada 30 Maret 2024.

²⁶ Meinita Triandini & Arie Kusuma Paksi, 2023, Motivasi Amerika Serikat Memberikan Sanksi Ekonomi Terhadap Venezuela Tahun 2017-2020, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* Vol,12; No. 3 (364-374).

Amerika Serikat terhadap Venezeula di masa kepemimpinan Maduro tahun 2018-2024?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Penelitian ini bertujuan sebagai syarat kelulusan atau memperoleh gelar sarjana dalam program studi Hubungan Internasional, fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai implementasi sanksi internasional yang diberikan Amerika Serikat terhadap Venezuela di masa kepemimpinan Maduro tahun 2018.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Sanksi Internasional

Dalam bidang politik internasional, terdapat suatu norma yaitu norma internasional yang membuat aktor aktor baik negara maupun organisasi internasional secara tidak langsung wajib mengikuti atau mematuhi norma tersebut. Adanya norma internasional diawali dari konsep keadilan global atau *global justice* yang kemudian memicu terciptanya sebuah sanksi internasional. Selain adanya keadilan domestik, terdapat keadilan di luar batas negara dan kewajiban antar negara satu dengan yang lain yang cenderung masih dikesampingkan.²⁷ Keadilan melalui perspektif John Rawls memiliki dua prinsip yaitu (1) hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan

²⁷ Muhammad Faris Alfadh, 2013, Keadilan Global dan Norma Internasional, Jurnal Hubungan Internasional Vol. 2 No 2.

yang sama bagi semua individu, (2) ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberi keuntungan bagi setiap individu serta semua posisi dan jabatan terbuka secara sama bagi semua individu.²⁸ Melalui pemaparan tersebut, keadilan secara tidak langsung menjadi sebuah norma yang wajib dipatuhi selayaknya individu wajib menghargai bahwa individu lain memiliki hak untuk mendapat perlakuan yang adil.

Salah satu upaya yang menjadikan keadilan sebagai norma internasional adalah deklarasi HAM pada sidang umum PBB tahun 1948 yang menjadi dasar pengakuan atas hak – hak dasar setiap manusia dimana tidak ada satu orang atau lembaga apapun yang berhak melanggarnya.²⁹ Karena bukan sebuah instrumen yuridis yang berkekuatan mengikat, deklarasi HAM selanjutnya menjadi landasan pembentukan instrumen yang secara fundamental dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Pada tahun 1951, dalam sidang PBB, Majelis Umum meminta Komisi HAM untuk merancang dua perjanjian mengenai HAM yaitu hak sipil dan politik serta hak ekonomi yang disebut dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), serta hak sosial dan budaya atau *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR).³⁰ Rancangan tersebut akhirnya disahkan sebagai kovenan (perjanjian) internasional bidang asasi manusia melalui Resolusi 2200 A (XXI) di tanggal 16 Desember 1966 yang kemudian disebut sebagai International Bill of Human Rights.³¹ Kedua kovenan tersebutlah yang akhirnya menjadi hukum kebiasaan internasional dan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Muhammad Faris Alfadh, 2013, Keadilan Global dan Norma Internasional, Jurnal Hubungan Internasional Vol. 2 No 2.

³¹ *Ibid.*

norma yang diakui sebagai standar acuan bersama untuk setiap negara yang meratifikasinya agar nilai – nilai keadilan bisa ditegakkan dan perlindungan atas ketidakadilan bisa diberikan kepada individu bahkan negara yang hak – hak dasarnya tidak terpenuhi akibat sistem sosial, kebijakan negara maupun faktor – faktor lain.

Melalui penerapan perjanjian internasional tentang HAM dan segala norma internasional yang berlaku, tentu ada akibat – akibat yang bermunculan apabila norma dan perjanjian tersebut tidak dilaksanakan atau tidak dipatuhi. Logika sederhana dari sanksi adalah adanya pelanggaran terhadap norma – norma internasional dan konsekuensi yang akan ditimbulkan secara kolektif pun akan terjadi.³² Sanksi internasional adalah tindakan yang diambil secara kolektif oleh negara – negara untuk memastikan kepatuhan terhadap norma internasional yang dapat bersifat diplomatik, sosial, budaya maupun ekonomi.³³ Penjatuhan sanksi memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk memaksa atau mengubah perilaku, untuk membatasi akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk memberikan peringatan dan stigmatisasi.³⁴ Sanksi dapat memberi peringatan bahwa pelanggaran tertentu terhadap hukum atau norma tidak akan ditolerir serta untuk mencegah tindakan diluar peraturan yang berlaku di waktu yang akan datang baik oleh berbagai negara terutama yang telah menyetujui kewajiban internasional.

³² Peter Wilson & Joanne Yao, 2019, *International Sanctions As A Primary Institutions of International Society*, <http://eprints.lse.ac.uk/88582>, diakses pada 30 Maret 2024.

³³ *Ibid.*

³⁴ Tom Ruys, 2016, *Research Handbook on UN Sanctions and International Law: Sanctions, Retorsions and Countermeasures: Concepts and International Legal Framework*, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/UCM/ReportHRC48/Academia/submission-tom-ruys-2.pdf>, diakses pada 30 Maret 2024.

Untuk menjadikan sanksi sebagai suatu keputusan yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, sanksi tidak hanya merupakan tindakan yang disepakati dan diterapkan secara kolektif namun juga tindakan yang disepakati dalam kerangka internasional dan diterapkan dibawah wewenang organisasi tersebut. Dalam piagam PBB, Dewan Keamanan mempunyai kewenangan untuk menjadikan sanksi sebagai sebuah perintah untuk menghadapi ancaman atau pelanggaran terhadap perdamaian atau sebagai tanggapan terhadap tindakan agresi, dan para anggota terikat untuk melaksanakan keputusannya.³⁵ Selain dewan keamanan, Majelis Umum juga memiliki wewenang untuk mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran norma. Dalam sidang tahunan dan sidang darurat, Majelis Umum memiliki wewenang untuk mengancam perilaku yang tidak dapat diterima dan merekomendasikan sanksi dengan dua pertiga suara mayoritas.³⁶

Terdapat tiga pendekatan dalam mengartikan sanksi. Yaitu berdasarkan pendekatan tujuan dan berfokus pada tujuan tindakan sanksi untuk menanggapi adanya pelanggaran norma hukum. Pendekatan kedua berfokus pada identitas pembuat tindakan sanksi dan membatasi konsep tersebut pada tindakan yang diadopsi oleh organisasi internasional serta sesuai dengan instrumen penyusunnya. Pendekatan ketiga berfokus pada teori yang mendefinisikan sanksi dengan mengacu pada jenis sanksi yang diberlakukan dan menafsirkan secara spesifik pada sanksi ekonomi.³⁷

³⁵ Margaret Doxey, 1983, *Case Western Reserve Journal of International Law: International Sanctions in Theory and Practice* Vol 15; Issue 273 (273-288).

³⁶ Margaret Doxey, 1983, *Case Western Reserve Journal of International Law: International Sanctions in Theory and Practice* Vol 15; Issue 273 (273-288).

³⁷ Tom Ruys, 2016, *Research Handbook on UN Sanctions and International Law: Sanctions, Retorsions and Countermeasures: Concepts and International Legal Framework*,

Secara umum, pemberian sanksi diberlakukan dalam sebuah bentuk sanksi ekonomi. Sanksi yang digunakan dalam politik terbagi atas sanksi ekonomi dan sanksi politik.³⁸ Sebagai sebuah instrumen untuk mengatur ketertiban akibat adanya pelanggaran norma maupun hukum internasional dalam suatu negara tanpa adanya keterlibatan kekuatan militer, sanksi internasional, terutama ekonomi, telah digunakan secara umum oleh berbagai negara untuk mengatur dan menertibkan kepentingan politik internasional mereka terhadap negara yang tergugat atas sanksi itu sendiri. Teori sanksi pada dasarnya merupakan perluasan dari mekanisme preferensi kebijakan suatu negara yang ditransmisikan ke negara lain.³⁹ Meskipun pada dasarnya sanksi adalah tindakan intervensi, namun pemberlakuan sanksi jauh lebih efisien, tidak memerlukan pengeluaran yang besar dan minim resiko dibandingkan mendeklarasikan terjadinya perang atau aksi militer.⁴⁰

Sistem perekonomian suatu negara merupakan hal fundamental yang menjadikan negara tersebut dapat menjalankan berbagai kepentingannya. Dalam menjalankan dan mempertahankan sistem perekonomiannya, negara tidak mungkin berdiri sendiri tanpa melakukan kerja sama atau ‘perdagangan’ dengan negara lain. Sanksi ekonomi diberlakukan dalam bentuk embargo ekonomi, pembatasan ekspor impor, pembekuan asset, pembatasan modal, pengurangan

<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/UCM/ReportHRC48/Academia/submission-tom-ruys-2.pdf>, diakses pada 30 Maret 2024.

³⁸ Meinita Triandini & Arie Kusuma Paksi, 2023, Motivasi Amerika Serikat Memberikan Sanksi Ekonomi Terhadap Venezuela Tahun 2017-2020, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol,12; No. 3 (364-374).

³⁹ Meinita Triandini & Arie Kusuma Paksi, 2023, Motivasi Amerika Serikat Memberikan Sanksi Ekonomi Terhadap Venezuela Tahun 2017-2020, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol,12; No. 3 (364-374).

⁴⁰ *Ibid.*

bantuan asing hingga sanksi investasi seperti pembatasan aliran modal ke negara target yang dapat dilayangkan dalam bentuk Undang – Undang maupun perintah eksekutif.⁴¹ Maka dari itu, sanksi ekonomi dapat memberikan dampak yang sangat signifikan bila diberlakukan kepada negara yang memang terkualifikasi melanggar norma atau aturan internasional tertentu.

Berbicara mengenai sanksi ekonomi yang sering digunakan oleh berbagai negara untuk menjalankan kepentingan kebijakan luar negerinya, terdapat beberapa asumsi yang mendasari mengapa sebuah negara dijatuhi sanksi. Sanksi ekonomi dapat meningkatkan pengeluaran negara dan memotong hubungan ekonomi dengan negara lain sehingga dapat mengurangi perdagangan lintas batas. Selain itu, sanksi ekonomi dapat merugikan perekonomian karena pada dasarnya negara tidak dapat menjalankan perdagangan internasional dalam jangka waktu yang lama.⁴² Maka dari itu, penjatuhan sanksi ekonomi dapat dijadikan sebagai metode efektif untuk memberi contoh kepada masyarakat internasional bahwa ketidakpatuhan terhadap tatanan internasional dapat berdampak dengan hilangnya instrumen–instrumen yang dapat digunakan negara untuk menjalankan kebijakan dalam maupun luar negeri oleh negara itu sendiri.

Selain sanksi ekonomi sebagai bentuk sanksi yang paling umum digunakan, terdapat bentuk sanksi internasional lain yang juga menjadi alat bagi negara maupun aktor non negara untuk menertibkan norma – norma keadilan politik global. Sanksi diplomatik contohnya, merupakan sanksi internasional

⁴¹ *Ibid.*

⁴²Meinita Triandini & Arie Kusuma Paksi, 2023, Motivasi Amerika Serikat Memberikan Sanksi Ekonomi Terhadap Venezuela Tahun 2017-2020, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) Vol,12; No. 3 (364-374).

berupa tindakan politik yang diambil untuk menyatakan ketidaksetujuan atas suatu tindakan tertentu melalui upaya diplomatik.⁴³ Mengesampingkan pendekatan ekonomi maupun militer, sanksi ini berfokus pada bagaimana pemberian peringatan terhadap aktor yang dianggap melanggar norma keadilan global dengan cara pembatasan atau pemutusan hubungan diplomatik seperti pembatalan kunjungan pemerintah atau penarikan misi diplomatik.⁴⁴ Selain itu terdapat sanksi politik. Secara garis besar, sanksi politik dapat diartikan sebagai perluasan mekanisme preferensi kebijakan di satu negara yang ditransmisikan kepada negara lain dibidang politik⁴⁵ seperti penolakan atau ketidaksetujuan aktor negara maupun non negara dalam penetapan kebijakan atau keputusan politik yang dianggap melanggar norma – norma keadilan internasional.

Tidak jauh berbeda dengan bentuk sanksi yang lain, sanksi militer juga bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap aktor – aktor yang dianggap melanggar HAM atau membuat kebijakan tertentu yang tidak mengedepankan norma keadilan global. Sama halnya dengan kelangsungan kebijakan ekonomi atau kerja sama ekonomi yang merupakan pilar penting atas berlangsungnya kepentingan negara, kerja sama pertahanan antar negara juga merupakan landasan penting atas kelangsungan kepentingan keamanan nasional negara itu sendiri. Oleh karena itu, pengeluaran sanksi militer dianggap dapat mendorong tujuan kebijakan seperti reformasi ekonomi, promosi HAM dan pemerintahan yang

⁴³ Financial Crime Academy, 2025, *Different Types of Sanctions*, <https://financialcrimeacademy.org/different-types-of-sanctions/>, diakses pada 20 Maret 2025.

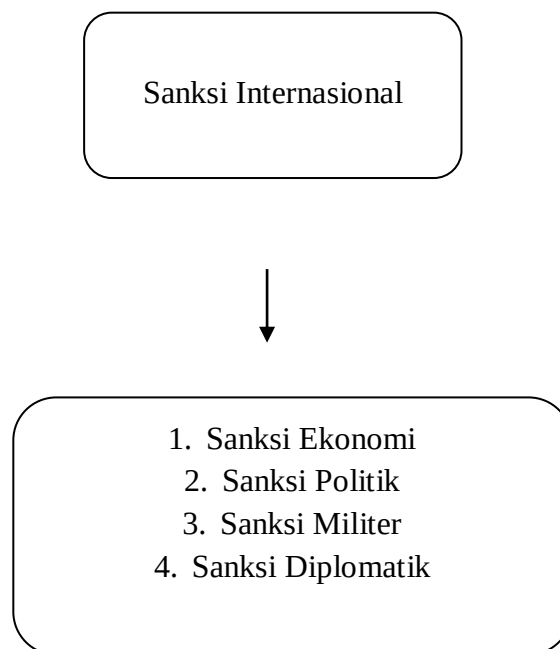
⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Meinita Triandini & Arie Kusuma Paksi, 2023, Motivasi Amerika Serikat Memberikan Sanksi Ekonomi Terhadap Venezuela Tahun 2017-2020, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* Vol,12; No. 3 (364-374).

adil.⁴⁶ Suatu negara menggunakan sanksi militer sebagai tanggapan terhadap tekanan publik domestik yang diberikan kepada para pemimpin negara tersebut untuk mengambil beberapa tindakan ketika dihadapkan pada perilaku yang tidak diinginkan oleh negara – negara yang melanggar aturan internasional, baik negara sekutu penerima bantuan militer maupun bukan penerima bantuan militer.⁴⁷ Bentuk dari sanksi militer biasanya berupa larangan ekspor senjata, amunisi militer maupun berbagai peralatan pertahanan keamanan lain hingga pemberhentian penyaluran bantuan militer.

1.5 Sintesa Pemikiran

Bagan 1.1 Sintesa Pemikiran



Sumber : Digambar oleh Penulis

⁴⁶ Jonathan Honig, 2023, *Journal of Liberty and International Affairs; Military Sanctions: The War On Terror And The Case of Uzbekistan*, Vol 9: No 1 (189-203).

⁴⁷ *Ibid.*

Berdasarkan rujukan pada latar belakang dan kerangka berpikir yang sudah dijelaskan penulis sebelumnya, maka terbentuklah bagian sintesa pemikiran tersebut. Penelitian ini berfokus pada penggunaan teori sanksi internasional secara umum dan secara khusus sesuai dengan bentuk - bentuk dari sanksi internasional itu sendiri.

1.6 Argumen Utama

Kekacauan politik yang terjadi pada Venezuela yang akhirnya membuat krisis ekonomi politik di Venezuela itu sendiri mengakibatkan pengeluaran sanksi internasional oleh AS. Keamanan kawasan dan pentingnya kepatuhan terhadap norma internasional menjadi landasan utama bagi AS untuk menjalankan kebijakan luar negeri. Pemberian sanksi internasional oleh AS ditujukan sebagai upaya untuk menertibkan kekacauan politik Venezuela yang secara tidak langsung melanggar tatanan politik internasional. AS memberikan sanksi internasional kepada Venezuela dalam bentuk sanksi politik, ekonomi, militer dan diplomatik. Sanksi ekonomi yang diberikan diantaranya berupa embargo, pemblokiran properti maupun aset pemerintah Venezuela dan pembatasan visa kepada pihak – pihak yang terlibat dalam tindakan maupun kebijakan yang teridentifikasi sebagai pelanggaran HAM maupun penyalahgunaan kekuasaan politik yang merupakan pemimpin entitas dan pejabat pemerintah yang terlibat dalam salah satu kegiatan

tersebut. Sanksi politik yaitu penolakan pengakuan Nicolas Maduro sebagai presiden terpilih pada tahun 2018 dan 2024, pengesahan Undang – Undang internasional sebagai upaya pemulihan demokrasi di Venezuela, sanksi militer berupa larangan penjualan dan pemindahan kembali senjata komersial AS ke Venezuela serta sanksi diplomatik berupa penarikan duta besar AS di Venezuela dan kerja sama AS dengan negara lain melalui forum internasional untuk memulihkan demokratisasi di Venezuela.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dari suatu fenomena tertentu secara obyektif.⁴⁸ Dalam penelitian deskriptif, penulis menganalisis dan melakukan interpretasi terhadap data – data yang telah dikumpulkan sesuai dengan konsep yang akan digunakan. Yang membedakan dengan tipe penelitian lain, permasalahan penelitian dalam penelitian deskriptif telah jelas, namun perlu penegasan terhadap pemilihan konsep atau teori yang digunakan dalam proses analisis.⁴⁹

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian yang diambil oleh penulis adalah tahun 2018 sampai tahun 2024. Pemilihan tahun yang ditulis penulis dimulai pada tahun 2018

⁴⁸ Elvis F. Purba & Parulian Simanjuntak, 2011, Metode Penelitian, Universitas HKBP Nommensen Medan.

⁴⁹ *Ibid.*

dikarenakan pada tahun tersebutlah konflik pemilihan umum Venezuela terjadi. Hingga tahun 2024, ketika Maduro terpilih kembali menjadi Presiden Venezuela dan konflik masih tetap berlanjut sehingga penulis memilih 2018 – 2024 sebagai rentang waktu dalam penelitian ini.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah *document based research* atau penelitian dokumen. Penelitian dokumen merupakan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan sumber sekunder. Penelitian dengan menggunakan teknik ini tentunya mengacu pada permasalahan dan tujuan penelitian itu sendiri. Data atau sumber sekunder adalah data yang telah ada atau telah dikumpulkan oleh individu atau instansi lain dan siap digunakan oleh pihak ketiga.⁵⁰

Data atau sumber sekunder dapat diperoleh dari dua sumber utama, yang pertama melalui statistik resmi atau data berupa laporan yang diterbitkan oleh organisasi resmi pemerintah maupun non pemerintah. Sumber kedua yaitu segala sumber data yang bersifat umum seperti majalah, koran, buku, data penelitian lain yang sudah terjadi, laporan resmi dari instansi pemerintah, arsip pribadi dan segala data yang termasuk dalam kepustakaan penelitian terkait.⁵¹

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Prinsip penelitian kualitatif adalah menemukan teori dan data.⁵² Analisis data

⁵⁰ Elvis F. Purba & Parulian Simanjuntak, 2011, Metode Penelitian, Universitas HKBP Nommensen Medan.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Dewi Kurniasih; Yudi Rusfiana; Agus Subagyo; Rira Nuradhawati, 2021, Teknik Analisa.

dalam penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan analisis deksriptif, yang diawali dengan pengelompokan data yang sama, lalu melakukan interpretasi untuk memberikan makna terhadap setiap aspek dan hubungan antar satu dengan lainnya.⁵³

1.7.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian “Pemberian Sanksi Amerika Serikat Terhadap Venezuela Di Masa Kepemimpinan Maduro Tahun 2018 – 2024”, penulis menjabarkan tulisannya dalam empat bab, yakni sebagai berikut :

Bab 1 berisikan latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tujuan dari penelitian baik secara umum maupun khusus, kerangka berpikir, sintesa pemikiran, argumen utama, serta metodologi dari penelitian ini.

Bab 2 menjabarkan mengenai sanksi politik dan sanksi ekonomi AS ke Venezuela tahun 2018-2024

Bab 3 menjabarkan mengenai sanksi militer dan sanksi diplomatik AS ke Venezuela 2018-2024

Bab 4 memuat kesimpulan dan saran terhadap penelitian ini berdasarkan pada pembahasan yang telah dijabarkan pada bab – bab sebelumnya.

⁵³ *Ibid.*